

BAPPELITBANGDA KOTA BATU
PROSES BISNIS

2019

REGULASI

Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421)

Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 244, Tambahan Lembaran Negara No. 5587)

Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur No. 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025

**RPJPD
KOTA BATU**

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4833)

Peraturan Daerah Jawa Timur No. 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 3, Seri D, Tambahan Lembaran Daerah No. 39)

Peraturan Daerah Kota Batu No. 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022

VISI RPJMD 2017-2022

DESA BERDAYA KOTA BERJAYA MEWUJUDKAN KOTA BATU SEBAGAI SENTRA AGRO WISATA INTERNASIONAL YANG BERKARAKTER, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA

MISI KE-5 RPJMD

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Akuntabel Berorientasi pada Pelayanan Publik Yang Profesional

TUJUAN MISI KE-5 RPJMD

Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik yang baik dan profesional yang didukung oleh mantapnya sistem kelembagaan dan aparatur yang berkualitas dan berkompeten berdasarkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

INDIKATOR TUJUAN

Indeks Reformasi Birokrasi

SASARAN MISI KE-5 RPJMD

Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan

INDIKATOR SASARAN RPJMD

Nilai Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

TUJUAN RENSTRA BAPPSELITBANGDA

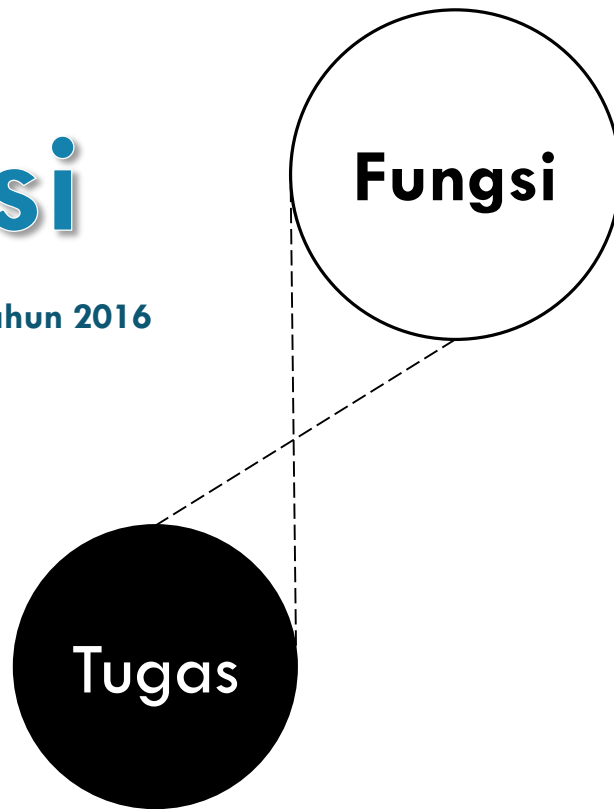
Meningkatnya kapasitas tata kelola pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan

INDIKATOR TUJUAN RENSTRA

Nilai Kinerja di Bidang Perencanaan Pembangunan

Tugas & Fungsi

Peraturan Walikota Batu No. 89 Tahun 2016



Melaksanakan Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Daerah di bidang **Perencanaan Pembangunan Daerah**

Perumusan kebijakan teknis dan rencana strategis di bidang perencanaan dan kelitbangan

Penetapan rencana kerja dan anggaran di bidang perencanaan dan kelitbangan

Penyelenggaraan kebijakan di bidang perencanaan dan kelitbangan;

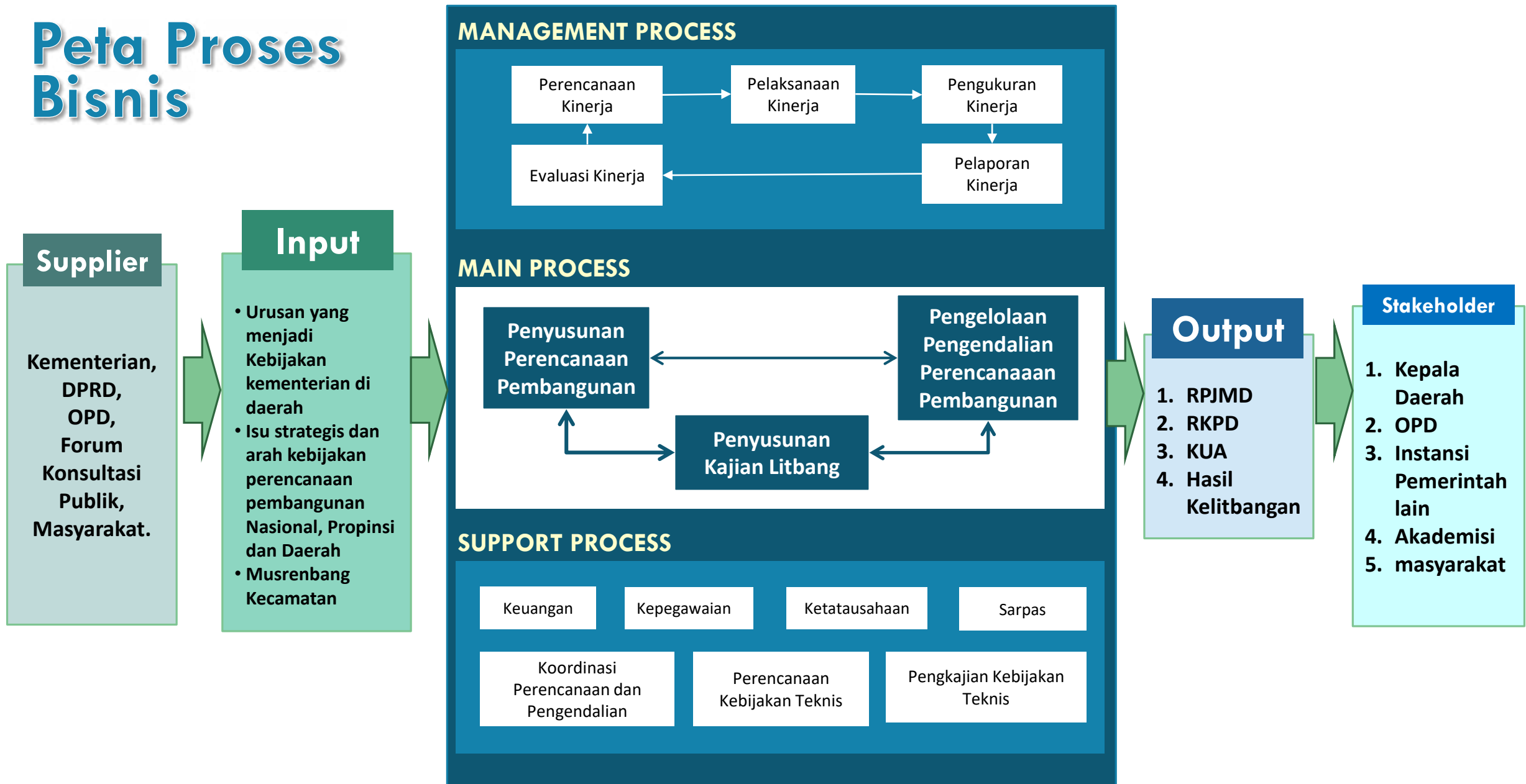
Penyelenggaraan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur bappelitbangda;

Penyelenggaraan administrasi dinas di bidang perencanaan dan kelitbangan;

Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perencanaan dan kelitbangan;

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Peta Proses Bisnis



MANAGEMENT PROCESS

SKEMA PETA PROSES BISNIS



MAIN PROCESS

SKEMA PETA PROSES BISNIS

Isu strategis dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Nasional, Propinsi dan Daerah

Musrenbang Kecamatan

Urusan yang menjadi Kebijakan Kementerian di daerah

input

Verifikasi usulan

Dijabarkan dalam Kerangka perencanaan program kegiatan sectoral

Sinkronisasi dan harmonisasi pada musrenbang

proses

BIDANG ANALISIS, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

SUBID PERENCANAAN DAN ANALISIS PENDANAAN PEMBANGUNAN
SUBID PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
SUBID DATA DAN PELAPORAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

BIDANG-BIDANG PEMB. SEKTORAL (Sosbud & Sarpraswil)

Substansi diintegrasikan oleh bidang analisis pengendalian dan pelaporan perencanaan pembangunan

Penjabaran isu strategis RPJMD kota

Penyusunan progiat

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

SUBID KAJIAN INFORMASI DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
SUBID KAJIAN SDA DAN PEMBANGUNAN
SUBID KAJIAN PEMERINTAHAN DAN KEMASYARAKATAN

tindak lanjut hasil kajian (progiat)

Penjabaran Isu strategis SKPD

PERANGKAT DAERAH (SKPD)

FEED BACK

RPJPD, RPJMD, RKPD, KUA PPAS, Kajian Litbang

output

SUPPORT PROCESS

SKEMA PETA
PROSES BISNIS



Proses Bisnis Berdasarkan Kelompok Urusan





Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran Misi ke-5
RPJMD Kota Batu
2017-2022

Iv. 0

Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan

Iv. 1

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Eselon II

Iv. 2

Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan Pembangunan Daerah yang Tepat Waktu

Eselon III

Terpenuinya kebutuhan dokumen RPJMD, RKPD, KUA, dan LAPTAH

Iv. 3

Eselon IV

Penyusunan dan Penetapan KUA PPAS dan KUA PPAS Perubahan

Penyelenggaraan Musrenbang

Penyusunan dan Penetapan RKPD dan RKPD Perubahan

Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

Penyusunan dan Pelaporan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah

Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang Analisis, Pengendalian dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan



Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran Misi ke-5 RPJMD Kota Batu 2017-2022

Iv. 0

Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan

Iv. 1

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Eselon II

Iv. 2

Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Strategis dan Tahunan

Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Strategis dan Tahunan pada Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan

Eselon III

Iv. 3

Perencanaan dan Pengendalian dalam Penanggulangan Kemiskinan Daerah

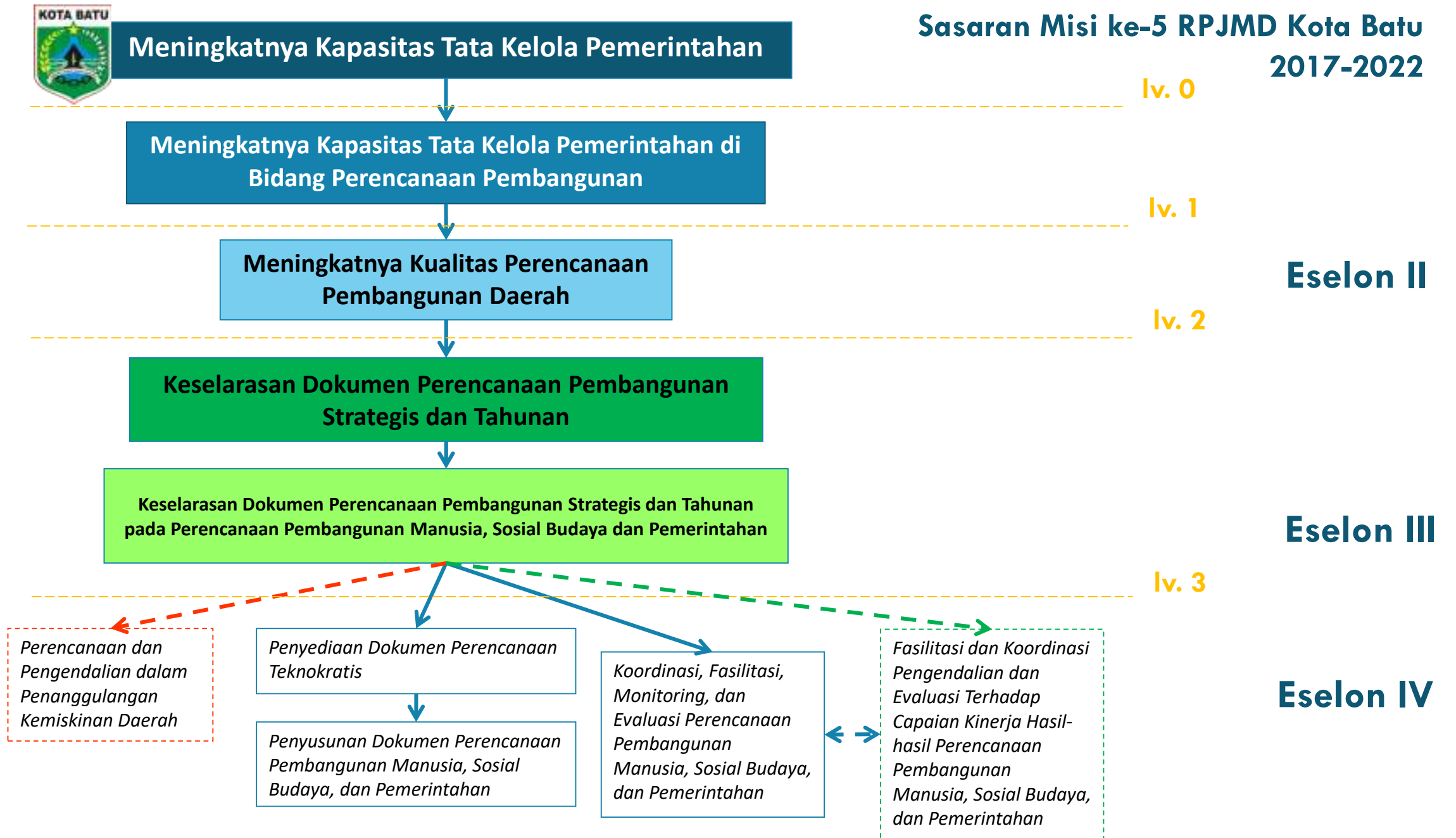
Penyediaan Dokumen Perencanaan Teknokratis

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan

Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan

Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja Hasil-hasil Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan

Eselon IV





Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran Misi ke-5 RPJMD Kota Batu 2017-2022

Iv. 0

Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan

Iv. 1

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Eselon II

Iv. 2

Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Strategis dan Tahunan

Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Strategis dan Tahunan pada Perencanaan Pembangunan Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Wilayah

Eselon III

Iv. 3

Koordinasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Penyediaan Dokumen Perencanaan Teknokratis

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan, Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan

Koordinasi, Monitoring, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan

Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja Hasil-hasil Perencanaan Pembangunan, Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan

Eselon IV





Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

Sasaran Misi ke-5 RPJMD Kota Batu 2017-2022

Iv. 0

Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan

Iv. 1

Meningkatnya Kualitas Penelitian atau Kajian untuk Perencanaan Pembangunan

Eselon II

Iv. 2

Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dapat Digunakan Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Eselon III

Iv. 3

Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Penelitian dan Pengembangan

Penyusunan Kajian Kebijakan Pembangunan Ekonomi, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan

Penyusunan Kajian Kebijakan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan

Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Inovasi Daerah dan Pemanfaatan Teknologi

Eselon IV

Evaluasi Cascading Kinerja



EVALUASI CASCADING KINERJA



Tujuan: Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan

Indikator: Nilai Kinerja Perencanaan (SAKIP)

Sasaran: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator:

- Persentase Kesesuaian Target Hasil Program Renstra OPD terhadap Target Hasil Program RPJMD
- Persentase Kesesuaian Target Hasil Program Renja terhadap Target Hasil Program RKPD

Program: Penyusunan Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan Pembangunan Daerah

Indikator:

- Persentase Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan Pembangunan Daerah yang Tersusun Tepat Waktu

Es II

Es III

Es IV

Catatan:

Kegiatan koordinasi tidak sesuai dengan proses bisnis, karena merupakan sub kegiatan dari setiap kegiatan yang sudah ada.

- Penyusunan dan Penetapan KUA PPAS dan KUA PPAS Perubahan
Ind: Jumlah dokumen KUA PPAS dan KUA PPAS-P
- Penyelenggaraan Musrenbang
Ind: Terlaksanakannya agenda Musrenbang
- Koordinasi dan Sinkronisasi Bidang AP4
Ind: Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi **✗**
- Penyusunan dan Penetapan RKPD dan RKPD Perubahan
Ind: Jumlah Perwali RKPD dan RKPD-P
- Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan
Ind: Jumlah Dokumen Monev Perencanaan Pembangunan
- Peny. dan Pelaporan Informasi Penyelenggaraan Pemb. Daerah
Ind: Jumlah Dokumen Informasi Pembangunan Daerah

EVALUASI CASCADING KINERJA



Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

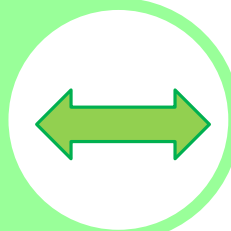
Keselarasn Dokumen Perencanaan Pembangunan Strategis dan Tahunan

Keselarasn Dokumen Perencanaan Pembangunan Strategis dan Tahunan pada Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan

Penyediaan Dokumen Perencanaan Teknokratis

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan

Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja Hasil-hasil Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan



Tujuan: Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan

Indikator: Nilai Kinerja Perencanaan (SAKIP)

Sasaran: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator:

- Persentase Kesesuaian Target Hasil Program Renstra OPD terhadap Target Hasil Program RPJMD
- Persentase Kesesuaian Target Hasil Program Renja terhadap Target Hasil Program RKPd

Program: Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan

Indikator:

- Persentase keselarasn dokumen Renstra terhadap RPJMD dan dokumen Renja terhadap RKPd pada Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan

Es II

Es III

Es IV

Catatan:

Indikator pada cascading kinerja belum mengakomodir aspek pembangunan urusan sesuai cascading di eselon IV. Kegiatan koordinasi belum mengarah pada fasdalev capaian kinerja hasil renbang. Kinerja pengendalian dan penanggulangan kemiskinan bisa jadi terlalu besar jika ditangani setingkat eselon IV.

Koordinasi, Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan

Ind: Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan manusia, sosial budaya, dan pemerintahan

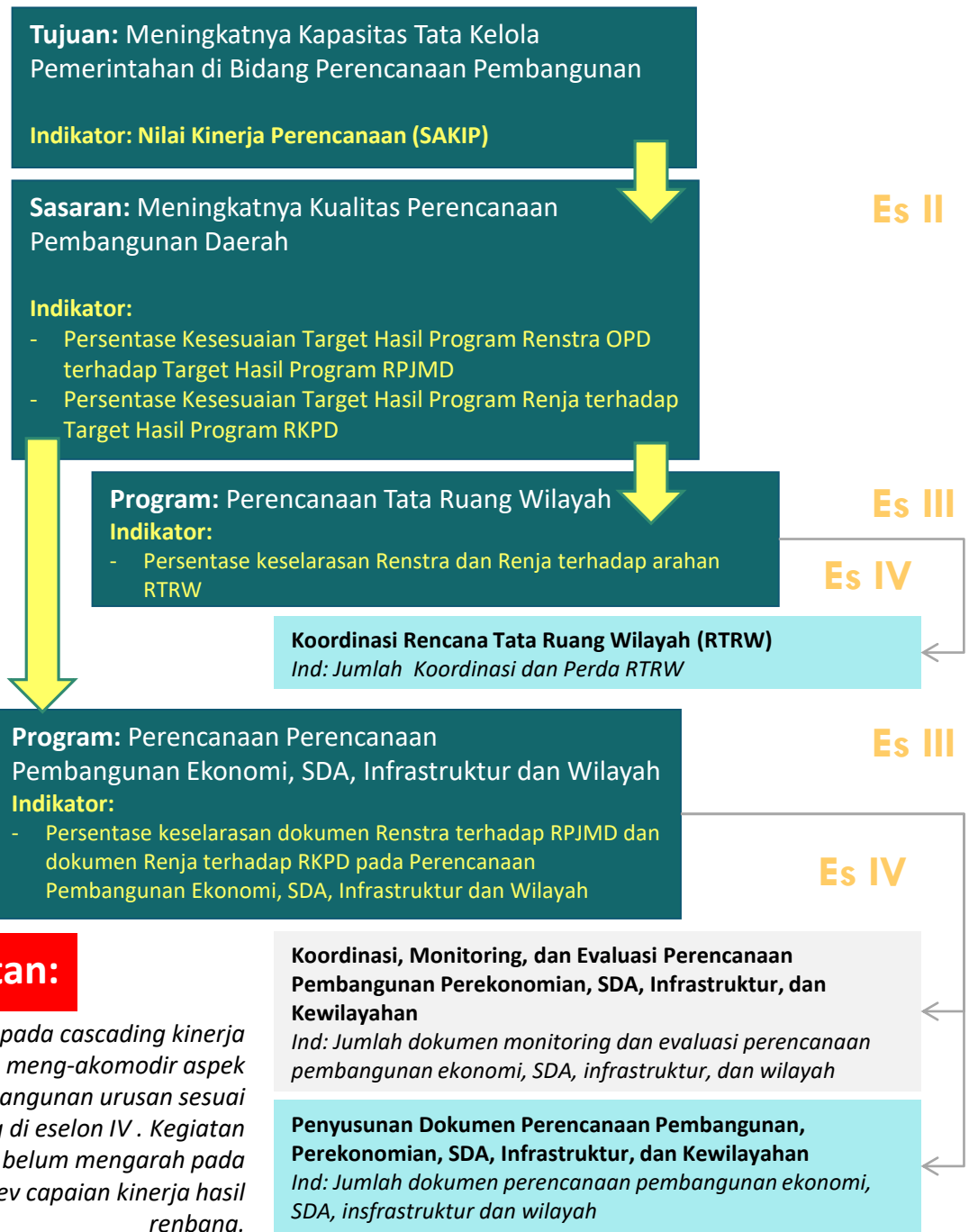
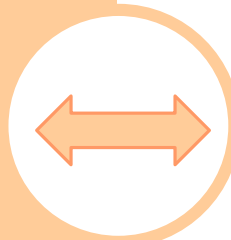
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan

Ind: Jumlah Dokumen RAD Pengarusutamaan Gender

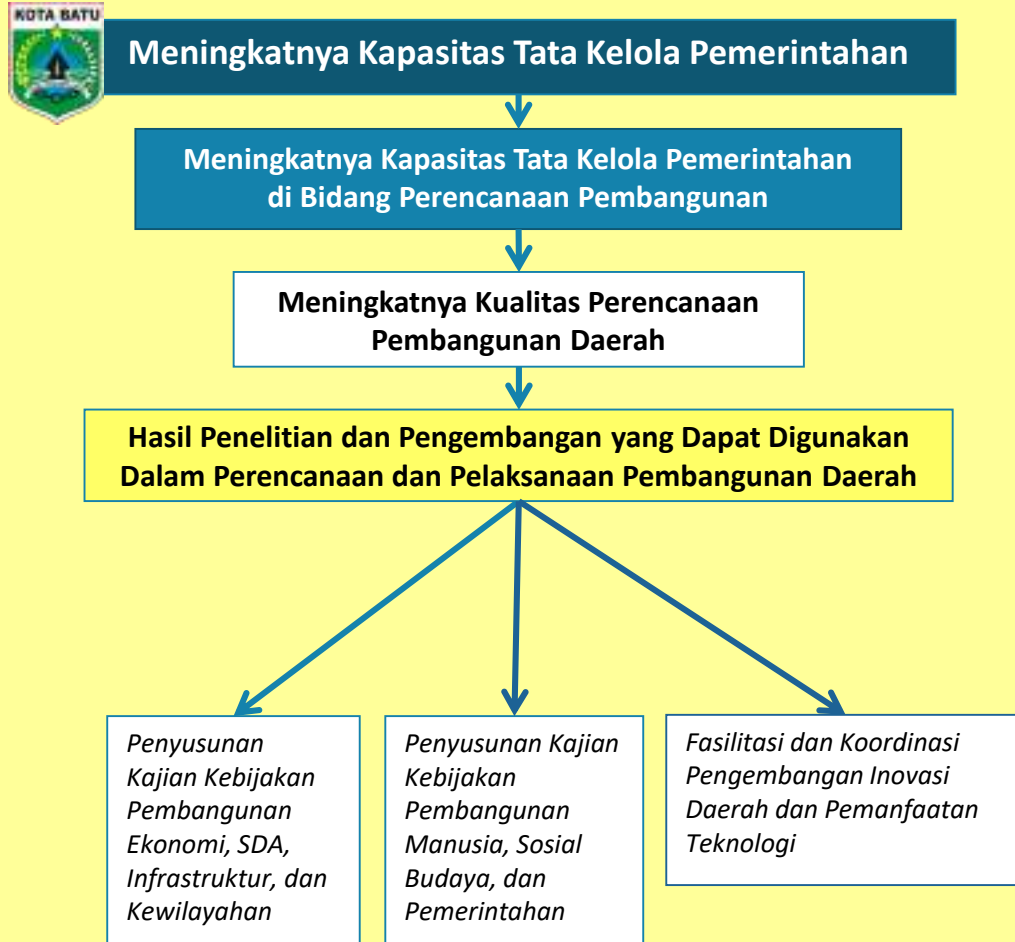
Perencanaan dan Pengendalian dalam Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Ind: Jumlah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah dan dokumen hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah

EVALUASI CASCADING KINERJA



EVALUASI CASCADING KINERJA



Tujuan: Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan

Indikator: Nilai Kinerja Perencanaan (SAKIP)

Sasaran: Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Indikator:

- Presentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

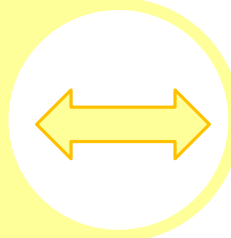
Program: Penelitian dan Pengembangan

Indikator:

- Presentase hasil penelitian dan pengembangan yang digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah

Es II

Es III



Catatan:

Probis belum terakomodir secara penuh, dimana urusan pengembangan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi belum muncul pada cascading. Kegiatan koordinasi belum mengarah pada fasdalev capaian kinerja hasil renbang.

Es IV

- Penyusunan Kajian Kebijakan Pembangunan Ekonomi, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan**
Ind: Jumlah kajian/pengembangan kebijakan pembangunan ekonomi, SDA, infrastruktur, dan kewilayahan
- Penyusunan Kajian Kebijakan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan**
Ind: Jumlah kajian kebijakan pembangunan manusia, sosial budaya, dan pemerintahan
- Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Bidang Penelitian dan Pengembangan**
Ind: Jumlah laporan koordinasi dan sinkronisasi

Evaluasi Struktur Organisasi



EVALUASI STRUKTUR ORGANISASI



Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Pengendalian, dan Pelaporan Pembangunan Daerah yang Tepat Waktu

Terpenuhinya kebutuhan dokumen RPJMD, RKPD, KUA, dan LAPTAH

Penyelenggaraan Musrenbang

Penyusunan dan Penetapan KUA PPAS dan KUA PPAS Perubahan

Penyusunan dan Penetapan RKPD dan RKPD Perubahan

Monitoring dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

Penyusunan dan Pelaporan Informasi Penyelenggaraan Pembangunan Daerah



KEPALA BAPPELITBANGDA

SEKRETARIS

BIDANG ANALISIS, PENGENDALIAN, DAN PELAPORAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

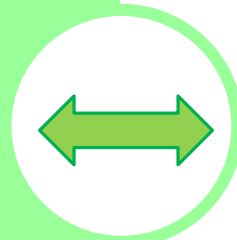
Sub Bidang Perencanaan dan Analisis Pendanaan Pembangunan

Sub Bidang Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan

Sub Bidang Data dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan

- *Antara proses bisnis dan kelembagaan telah memiliki kesesuaian*

EVALUASI STRUKTUR ORGANISASI



- *Antara proses bisnis dan kelembagaan telah memiliki kesesuaian*

EVALUASI STRUKTUR ORGANISASI



Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

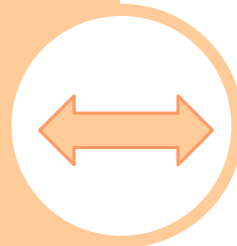
Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Strategis dan Tahunan

Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Strategis dan Tahunan pada Perencanaan Pembangunan Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Wilayah

Penyediaan Dokumen Perencanaan Teknokratis

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan, Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan

Fasilitasi dan Koordinasi Pengendalian dan Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja Hasil-hasil Perencanaan Pembangunan, Perekonomian, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan



KEPALA BAPPELITBANGDA

SEKRETARIS

BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR, DAN KEWILAYAHAN

Sub Bid Perenc Pembangunan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, & Kewilayahan I

Sub Bid Perenc Pembangunan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, & Kewilayahan II

Sub Bid Perenc Pembangunan Perekonomian, SDA, Infrastruktur, & Kewilayahan III

- *Antara proses bisnis dan kelembagaan telah memiliki kesesuaian*

EVALUASI STRUKTUR ORGANISASI



Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan

Meningkatnya Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Perencanaan Pembangunan

Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah

Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Dapat Digunakan Dalam Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan Kajian Kebijakan Pembangunan Ekonomi, SDA, Infrastruktur, dan Kewilayahan

Penyusunan Kajian Kebijakan Pembangunan Manusia, Sosial Budaya, dan Pemerintahan

Fasilitasi dan Koordinasi Pengembangan Inovasi Daerah dan Pemanfaatan Teknologi



KEPALA BAPPELITBANGDA

SEKRETARIS

BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Sub Bidang Kajian Informasi dan Pemanfaatan Teknologi

Sub Bidang Kajian Sumber Daya Alam dan Pembangunan

Sub Bidang Kajian Pemerintahan dan Masyarakat

- *Antara proses bisnis dan kelembagaan telah memiliki kesesuaian*



Terima Kasih

BAPPELITBANGDA KOTA BATU
TAHUN 2019